

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528440, 021-3858171 Ext. 32040 Fax. 021-3441759
www.kemendag.go.id

**PANITIA REKRUTMEN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

P E N G U M U M A N

NOMOR KP.01/16/REK-CASN/PENG/09/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

**A. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH KEBUTUHAN, LOKASI KEBUTUHAN,
DESKRIPSI TUGAS DAN RENTANG PENGHASILAN**

Jumlah kebutuhan PPPK berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kebutuhan PPPK

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	PROFESI DOKTER GIGI	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL - KLINIK PRATAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2	TERAMPIL TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	D-3 KEPERAWATAN GIGI, D-3 KESEHATAN GIGI, DAN D-3 TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	1	SEKRETARIAT JENDERAL - KLINIK PRATAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
3	AHLI MUDA PUSTAKAWAN	5	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM;S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI;S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	UMUM (DISABILITAS)	1	PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN
4	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	5	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	UMUM	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
				UMUM	2	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
				UMUM	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
				UMUM (DISABILITAS)	1	INSPEKTORAT JENDERAL
5	AHLI PERTAMA - ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	5	S-1 HUKUM;D-IV HUKUM;S-1 EKONOMI MANAJEMEN;S-1 EKONOMI DAN BISNIS;S-1 EKONOMI AKUNTANSI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	5	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2	SEKRETARIAT JENDERAL
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
				KHUSUS	4	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				KHUSUS	2	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
7	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	5	S-1 HUKUM;D-IV HUKUM;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 EKONOMI PERTANIAN ;S-1 EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN;S-1 TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM;S-1 TEKNIK PERTANIAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN;S-1 HUKUM INTERNASIONAL;S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN;S-1 EKONOMI ISLAM;S-1 EKONOMI SYARIAH;S-1 AGRIBISNIS;S-1 ILMU HUKUM;S-1 SOSIAL POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 DESAIN PRODUK	KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
8	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	5	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN BISNIS;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK;D-IV POLITIK PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINITRASI PUBLIK;S-1 ILMU	UMUM	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN;S-1 PJJ MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN BISNIS;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN;S-1 STUDI PEMERINTAHAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 INFORMATIKA;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 PJJ SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	KHUSUS	2	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
9	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	5	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	5	SEKRETARIAT JENDERAL
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
				KHUSUS	2	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
				KHUSUS	1	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
10	AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	5	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 HUKUM;S-1 ILMU POLITIK;S-1 SOSIOLOGI;S-1 KOMUNIKASI;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 STATISTIKA;S-1	KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
				UMUM	4	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			PERTANIAN;S-1 SASTRA INGGRIS;S-1 SASTRA RUSIA;S-1 SASTRA ARAB;S-1 SASTRA PERANCIS			
11	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	5	S-1 HUKUM;D-IV HUKUM;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 EKONOMI ISLAM;S-1 EKONOMI SYARIAH;S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS;S-1 MATEMATIKA;S-1 FISIKA;S-1 BIOLOGI;S-1 MATEMATIKA;S- 1 STATISTIK;S-1 KOMPUTER;S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 PERTANIAN;S-1 BIDANG MARITIM;S-1 KOMPUTER DAN INFORMATIKA;S-1 KOMUNIKASI	KHUSUS	4	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
12	AHLI PERTAMA - PENERA	5	S-1 FISIKA;S-1 TEKNIK FISIKA;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK MESIN;S-1 MATEMATIKA	KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
13	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	5	S-1 ILMU HUKUM;S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 TEKNIK MESIN;S-1 ILMU EKONOMI;S- 1 MANAJEMEN;S-1 HUKUM;S- 1 TEKNIK SIPIL;S-1 PERTANIAN	KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
14	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	5	S-1 HUKUM;D-IV HUKUM;S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 PERTANIAN;S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
15	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	5	D-IV EKONOMI;D-IV EKONOMI MANAJEMEN;D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 ADMINISTRASI FISKAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NIAGA;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;S-1 EKONOMI BISNIS;S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI;S-1 EKONOMI DAN BISNIS;S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN;S-1 EKONOMI KEUANGAN;S-1 EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN;S-1 EKONOMI MANAJEMEN;S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN;S-1 EKONOMI SYARIAH;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU EKONOMI ISLAM;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN;S-1 BISNIS ISLAM;S-1 ILMU HUKUM;S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUKUM EKONOMI;S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH;S-1 HUKUM INTERNASIONAL;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 HUKUM PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM PERDATA;S-1 HUKUM PIDANA;S-1 HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN;S-1 HUKUM TATA NEGARA;S-1 HUKUM TATA NIAGA;S-1 KRIMINOLOGI;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;D-IV ARSITEKTUR;D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;D-IV PLANOLOGI;D-IV TEKNIK ARSITEKTUR;D-IV TEKNIK LINGKUNGAN;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 ELEKTRO;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU TEKNIK SIPIL;S-1 KONSTRUKSI SIPIL;S-1 MESIN;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 PERTANIAN;S-1 PLANOLOGI;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK	KHUSUS	1	SEKRETARIAT JENDERAL
				KHUSUS	3	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
				UMUM	5	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
				KHUSUS	5	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
				KHUSUS	4	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
				KHUSUS	1	INSPEKTORAT JENDERAL

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			ELEKTRO;S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA;S-1 TEKNIK GEODESI;S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA;S-1 TEKNIK GEOLOGI;S-1 TEKNIK GEOMATIKA;S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNIK PERKAPALAN;S-1 TEKNIK KIMIA;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI;S-1 TEKNIK MESIN;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH;S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN;S-1 TEKNIK PLANOLOGI;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL;S-1 TEKNOLOGI BIOPROSES;S-1 TEKNIK BIOMEDIS;S-1 TEKNIK TATA RUANG;S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI PUBLIK;D-IV ILMU ADMINISTRASI;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI BISNIS;S-1 ADMINISTRASI KEUANGAN;S-1 1 ADMINISTRASI NIAGA;S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI UMUM;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 ILMU ADMINISTRASI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 KOMUNIKASI;S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 PENGADAAN;S-1 SOSIOLOGI;S-1 SOSPOL;D-IV GEODESI;D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN;D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS;D-IV STATISTIKA BISNIS;S-1 BIOLOGI;S-1 FARMASI;S-1 FISIKA;S-1			

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			GEODESI;S-1 GEOFISIKA;S-1 GEOGRAFI;S-1 GEOLOGI;S-1 AKTUARIA;S-1 KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 KIMIA;S-1 MATEMATIKA;S-1 BIOLOGI;S-1 STATISTIKA;D-IV AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI KEUANGAN;D-IV AKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN;D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN;D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI FISKAL;S-1 AKUNTANSI;S-1 AKUNTANSI EKONOMI;S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI NEGARA;S-1 ILMU AKUNTANSI;S-1 KEUANGAN;D-IV MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI;D-IV MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK;S-1 BISNIS MANAJEMEN;S-1 ILMU MANAJEMEN;S-1 LOGISTIK BISNIS;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS;S-1 MANAJEMEN ASET;S-1 MANAJEMEN BISNIS;S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS;S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN;S-1 MANAJEMEN LOGISTIK;S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN;S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN;S-1 MANAJEMEN SDM;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN;S-1 MANAJEMEN SYARIAH;S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA;S-1			

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			MANAJEMEN TRANSPORTASI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN;D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA;S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA;S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN			
16	AHLI PERTAMA - PERENCANA	5	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2	SEKRETARIAT JENDERAL
				KHUSUS	5	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
				KHUSUS	6	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
				KHUSUS	4	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
				KHUSUS	3	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
				KHUSUS	1	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
				KHUSUS	1	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
17	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	5	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK;D-IV BROADCASTING;D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL;D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV HUKUM;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV ILMU KOMUNIKASI;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU POLITIK;D-IV JURNALISTIK;D-IV KOMUNIKASI;D-IV KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK;D-IV MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI;D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERITAAN;D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN;D-IV PENYIARAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI PUBLISISTIK/JURNALISTIK;S-1 ADMINITRASI PUBLIK;S-1 BROADCASTING;S-1 DESAIN GRAFIS;S-1 DESAIN KOMUNIKASI;S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 DESAIN WEB;S-1 DESIGN GRAFIS;S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 MANAJEMEN;D-IV	KHUSUS	1	SEKRETARIAT JENDERAL
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
				KHUSUS	1	INSPEKTORAT JENDERAL
				KHUSUS	1	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			MANAJEMEN;S-1 EKONOMI DAN BISNIS;S-1 EKONOMI MANAJEMEN;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 EKONOMI SDM;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (PR);S-1 HUBUNGAN MASSA;S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 1 HUKUM;S-1 FILM DAN TELEVISI;S-1 HUMAS;S-1 ILMU ADMINISTRASI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU JURNALISTIK;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KOMUNIKASI BIDANG ILMU HUMAS;S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUMAS;S-1 ILMU KOMUNIKASI ILMU JURNALISTIK;S-1 ILMU KOMUNIKASI PENYIARAN;S-1 ILMU KOMUNIKASI (PUBLIC RELATION);S-1 ILMU PEMERINTAH;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU SOSIAL POLITIK;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU SOSIAL POLITIK;S-1 JURNALISTIK;S-1 JURNALISTIK PUBLIC RELATION;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 KEHUMASAN;S-1 KOMUNIKASI;S-1 KOMUNIKASI DAN HUMAS;S-1 1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT;S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN;S-1 KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 1 KOMUNIKASI HUMAS;S-1 KOMUNIKASI JURNALISTIK;S-1 1 KOMUNIKASI MASSA;S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN;S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN;S-1 KOMUNIKASI PUBLIK;S-1 KOMUNIKASI PUBLISISTIK;S-1	KHUSUS	1	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI;S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S-1 1 MANAJEMEN PEMASARAN;S-1 MICE;S-1 PEMASARAN;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 PENYIARAN;S-1 POLITIK;S-1 PUBLIC RELATION;S-1 PUBLIK RELATION;S-1 PUBLISISTIK KEHUMASAN;S-1 1 SARJANA HUKUM;S-1 SARJANA SOSIAL;S-1 SINEMATOGRAFI;S-1 SOSIAL;S-1 SOSIAL DAN POLITIK;S-1 SOSIAL POLITIK;S-1 SOSIATRI;S-1 SOSIOLOGI;S-1 SOSPOL;S-1 TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING;S-1 MANAJEMEN PERHOTELAN;S-1 PARIWISATA;S-1 KEPERAWATAN;S-1 KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 HUKUM (PERDATA);S-1 HUKUM PIDANA;S-1 HUKUM TATA NEGARA;S-1 GEOGRAFI;S-1 BAHASA INDONESIA;S-1 ETNOMUSIKOLOGI;S-1 HUMANIORA;S-1 ILMU BUDAYA;S-1 ILMU HUMANIORA;S-1 ILMU SEJARAH;S-1 SASTRA INDONESIA;S-1 SENDRATASIK;S-1 SENI;S-1 BAHASA ASING;S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS;S-1 BAHASA INGGRIS;S-1 BAHASA PERANCIS;S-1 SASTRA INGGRIS;S-1 SASTRA PERANCIS;S-1 ARSITEKTUR;S-1 ILMU TANAH;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK GEODESI;S-1 TEKNIK MESIN;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 KEHUTANAN;S-1 MANAJEMEN KEHUTANAN;S-1 1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 KELAUTAN;S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA;S-1			

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			AGROTEKNOLOGI;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;S-1 BIOLOGI;S-1 PERTANIAN;S-1 PETERNAKAN;S-1 AGAMA;S-1 1 AGAMA BUDHA;S-1 AGAMA ISLAM;S-1 AHWAL AL SAHSHIYYAH;S-1 AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH;S-1 AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH;S-1 AHWAL SYAKHSHIYYAH;S-1 AHWALUS SYAKHSHIYYAH;S-1 AHWALUSYAHSHIYYAH;S-1 AKHWALUS SYAKHSHIYYAH;S-1 AQIDAH FILSAFAT;S-1 BAHASA ARAB;S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB;S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM;S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM;S-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM;S-1 BIMBINGAN KONSELING ISLAM;S-1 BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM;S-1 BIMBINGAN PENYULUH ISLAM;S-1 DAKWAH;S-1 DAKWAH DAN KOMUNIKASI;S-1 DHARMA ACARYA;S-1 DHARMA DUTA;S-1 FAKULTAS SYARIAH;S-1 FAK.USHULUDDIN;S-1 FILSAFAT ISLAM;S-1 GURU AGAMA BUDHA;S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 HUKUM KELUARGA;S-1 HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH);S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM;S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH);S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH);S-1 ILMU AGAMA ISLAM;S-1 ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR;S-1 ILMU ALQURAN DAN TAFSIR;S-1 ILMU KOMUNIKASI DAKWAH;S-1 ILMU KOMUNIKASI HINDU;S-1 ILMU KOMUNIKASI ISLAM;S-1 ILMU KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM;S-1 KEPANDITAAN BUDDHA;S-1 KEPENYULUHAN BUDDHA;S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM;S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM			

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			(DAKWAH);S-1 KOMUNIKASI HINDU;S-1 KOMUNIKASI ISLAM;S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM;S-1 MANAJEMEN DAKWAH;S-1 MANAJEMEN DAKWAH ISLAM;S-1 MUAMALAH;S-1 MUAMALAT;S-1 PENERANGAN AGAMA HINDU;S-1 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM;S-1 PENYIARAN ISLAM;S-1 PENYIARAN PENERANGAN AGAMA ISLAM;S-1 PERBANDINGAN AGAMA;S-1 PERBANDINGAN MAZHAB;S-1 PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM;S-1 POLITIK ISLAM;S-1 SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM;S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM;S-1 SOSIAL ISLAM;S-1 SOSIOLOGI AGAMA;S-1 TAFSIR HADITS;S-1 TARBIYAH;S-1 TEOLOGI/KATEKETIS;S-1 USHULUDDIN;S-1 EKONOMI ISLAM;S-1 EKONOMI SYARIAH;S-1 PERBANKAN SYARIAH;S-1 ADMINISTRASI;S-1 ADMINISTRASI BISNIS;S-1 ADMINISTRASI NIAGA;S-1 AKUNTANSI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA;D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI;D- IV TELEKOMUNIKASI;S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI;D- IV KALK;D-IV NAUTIKA;D-IV TEKNIKA			
18	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	5	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK;S-1 SAINS DATA;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNIK	KHUSUS	7	SEKRETARIAT JENDERAL
				KHUSUS	3	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
				UMUM	1	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
			INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;D-IV TEKNIK KOMPUTER;D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK;D-IV KOMPUTASI STATISTIK;D-IV SAINS DATA TERAPAN	UMUM	1	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
19	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	5	S-1 TEKNIK MESIN;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK FISIKA;S-1 MATEMATIKA;S-1 FISIKA	UMUM	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
20	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	5	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI;S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM;S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI;S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	UMUM (DISABILITAS)	1	SEKRETARIAT JENDERAL
21	AHLI PERTAMA - STATISTISI	5	S-1 STATISTIKA;S-1 STATISTIK;S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA;D-IV STATISTIKA;S-1 MATEMATIKA	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL
				UMUM	4	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
				UMUM	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
				UMUM	2	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
22	AHLI PERTAMA - WIDYAIKWARA	5	S-2 SEMUA JURUSAN	UMUM	1	SEKRETARIAT JENDERAL
23	MAHIR ARSIPARIS	5	D-III SEMUA JURUSAN	KHUSUS	1	SEKRETARIAT JENDERAL
24	TERAMPIL ARSIPARIS	5	D-III SEMUA JURUSAN	KHUSUS	9	SEKRETARIAT JENDERAL
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NO	JABATAN	MHPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN	
				KHUSUS	3	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	
				KHUSUS	2	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
				KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	
				KHUSUS	1	INSPEKTORAT JENDERAL	
25	TERAMPIL PENERA	-	5	D-III TEKNIK METROLOGI DAN INSTRUMENTASI;D-III TEKNIK FISIKA;D-III MATEMATIKA;D-III FISIKA	KHUSUS	1	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
26	TERAMPIL PRANATA KOMPUTER	-	5	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNOLOGI INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK INFORMATIKA	KHUSUS	3	SEKRETARIAT JENDERAL
					KHUSUS	2	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
					UMUM	1	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
					UMUM	1	INSPEKTORAT JENDERAL
27	TERAMPIL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	-	5	D-III ADMINISTRASI PUBLIK;D-III ADMINISTRASI NEGARA;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN;D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III MANAJEMEN PERKANTORAN;D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;D-III SEKRETARIAT;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	2	SEKRETARIAT JENDERAL
					KHUSUS	4	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
Total Formasi					149		

Informasi terkait tugas jabatan dan rentang penghasilan alokasi kebutuhan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional dan penghasilan PPPK sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II.

B. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Khusus; dan
2. Umum.

Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

C. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum yang harus dipenuhi pelamar yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PPPK, PPPK, CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PPPK, PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk BUMN/BUMD);
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil, mahir dan ahli pertama serta memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
10. Pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, selain itu pelamar juga wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
11. Pelamar merupakan lulusan Magister (S-2), Sarjana (S-1), Diploma IV (DIV), atau lulusan Diploma III (D-III) sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari skala

- 4,00 (empat koma nol) untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta:
- a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi; dan
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Setiap Pelamar hanya dapat melakukan pendaftaran pada 1 (satu) instansi, satu 1 (satu) jenis kebutuhan, dan 1 (satu) jabatan pada tahun anggaran yang sama;
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

D. PERSYARATAN KHUSUS

Berikut adalah persyaratan khusus bagi pelamar PPPK TA 2023:

1. Jabatan Ahli Pertama – Dokter Gigi dan Terampil – Terapis Gigi dan Mulut, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
2. Jabatan Ahli Pertama - Negosiator Perdagangan wajib memiliki Sertifikat TOEFL yang berlaku dan berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL dengan skor minimal 550.
3. Jabatan Ahli Pertama – Widyaiswara akan mendapatkan nilai tambahan nilai tambahan apabila memiliki:
 - 1) Sertifikasi Kompetensi KKNi atau Okupasi metodologi pelatihan jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Perancangan Program dan Media Pelatihan (25%);
 - 2) Sertifikasi Kompetensi Klaster Metodologi Pelatihan yang mencakup penyusunan program pelatihan dan media pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (25%); dan
 - 3) Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan *Training of Trainer* atau metodologi pengajaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi (25%).
4. Jabatan Ahli Pertama – Analis Kebijakan akan mendapatkan nilai tambahan 25% apabila memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional.
5. Sertifikasi Profesi Jabatan Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan mendapatkan nilai tambahan 25% apabila memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1;
6. Jabatan Ahli Pertama – Pengawas K metrologian akan mendapatkan nilai tambahan nilai tambahan apabila memiliki:
 - 1) Sertifikat Pelatihan *Awareness* ISO 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang masih berlaku dan (10%); dan
 - 2) Sertifikasi Pelatihan *Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang masih berlaku (10%).
7. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Laboratorium K metrologian akan mendapatkan nilai tambahan nilai tambahan apabila memiliki:
 - 1) Sertifikat Pelatihan *Awareness* ISO 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang masih berlaku dan (10%); dan
 - 2) Sertifikasi Pelatihan *Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang masih berlaku (10%).

8. Jabatan Ahli Pertama – Penerima akan mendapatkan nilai tambahan apabila memiliki:
 - 1) Sertifikat Pelatihan *Awareness* ISO 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang masih berlaku (10%); dan
 - 2) Sertifikasi Pelatihan *Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang masih berlaku (10%).
9. Jabatan Terampil – Penerima akan mendapatkan nilai tambahan apabila memiliki:
 - 1) Sertifikat Pelatihan Dasar K metrologian yang dikeluarkan oleh Akademi Metrologi dan Instrumentasi (20%); dan
 - 2) Sertifikasi Pelatihan *Awareness* ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan oleh Lembaga yang Tersertifikasi KAN yang masih berlaku (5%).

E. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

1. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal (atasan putih polos, tanpa menggunakan jas/blazer/rompi) dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - b. Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Perdagangan di Jakarta, dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam (format surat lamaran terlampir);
 - c. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam (format surat pernyataan terlampir);
 - d. Pembelian e-meterai sesuai dengan ketentuan pada bagian E. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK poin (b) dan (c) harus melalui <https://meterai-elektronik.com> atau Portal resmi PERURI. Tata cara pembelian e-materai pada dokumen dapat diakses pada tautan <https://youtu.be/BilEWpV6Ets?si=4mxoAN3zyTf87Bf8> atau melalui Kanal Youtube BKNgoidofficial;
 - e. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - f. *Scan* Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar dan ditambah *scan* surat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi saat kelulusan (jika keterangan terakreditasi belum tertera pada ijazah/transkrip nilai) dari cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab pada Pendidikan Tinggi yang dimiliki perguruan tinggi pelamar;
 - g. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - h. Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang diketik menggunakan komputer sesuai dengan ketentuan pada bagian C. PERSYARATAN UMUM Nomor 9 (format surat keterangan dan portofolio pengalaman kerja terlampir);

- i. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - 1) surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - 2) video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan
 - j. Scan Sertifikat TOEFL yang berlaku dan berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL untuk jabatan Negosiator Perdagangan Ahli Pertama;
 - k. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan pada bagian C. PERSYARATAN UMUM dan D. PERSYARATAN KHUSUS;
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

F. TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Based Assisted Test (CAT)* yang meliputi ujian:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosiokultural; dan
 - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
3. Lokasi seleksi kompetensi akan diumumkan lebih lanjut pada *website* <https://rekrutmen.kemendag.go.id>.
4. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi Teknis PPPK yaitu:
 - a. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi Teknis

Tabel 2
Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI MUDA - PUSTAKAWAN	270
2	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	225
3	AHLI PERTAMA - ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	203
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	270
5	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	203
6	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225
7	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	225
8	AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	203
9	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	203
10	AHLI PERTAMA - PENERA	203
11	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	203

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
12	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	203
13	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
14	AHLI PERTAMA - PERENCANA	315
15	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	248
16	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	270
17	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	203
18	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	225
19	AHLI PERTAMA - STATISTISI	270
20	AHLI PERTAMA - WIDYAIWARA	203
21	MAHIR - ARSIPARIS	225
22	TERAMPIL - ARSIPARIS	225
23	TERAMPIL - PENERA	203
24	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	270
25	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225

- b. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 117 (seratus tujuh belas); dan
- c. Nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

G. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

Jadwal seleksi Pengadaan PPPK adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jadwal Seleksi PPPK

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi melalui website Kementerian Perdagangan (https://rekrutmen.kemendag.go.id) link Portal Nasional (https://sscasn.bkn.go.id)	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran seleksi secara <i>online</i> Portal Nasional (https://sscacn.bkn.go.id)	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023

NO	KEGIATAN	TANGGAL
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH Nomor Induk PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

Catatan: jadwal dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan melalui website <https://rekrutmen.kemendag.go.id> dan Portal Nasional <https://sscasn.bkn.go.id/>.

H. SISTEM KELULUSAN PPPK

1. Hasil kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Panitia Rekrutmen PPPK Kementerian Perdagangan pada laman <https://rekrutmen.kemendag.go.id>;
2. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil Seleksi Administrasi;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTU) secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan kertas HVS ukuran A4;
4. Penilaian dan penetapan kelulusan seleksi kompetensi berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, Keputusan Menteri PANRB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, Keputusan Menteri PANRB Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional TA 2023 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam PPPK TA 2023;
5. Kelulusan Seleksi Kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

I. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar wajib menggunakan e-meterai pada surat lamaran dan surat pernyataan. Tata cara pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>. E-meterai yang sudah digunakan untuk 1 (satu) dokumen, tidak digunakan untuk dokumen lainnya;

2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun/sesuai dengan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional Terampil/Pertama;
3. Pendaftaran di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
4. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi CPPPK tidak dipungut biaya;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, dihimbau agar pelamar tidak mempercayai apabila ada oknum/pihak – pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kementerian Perdagangan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Perdagangan atau Panitia Rekrutmen;
7. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
8. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Rekrutmen CPPPK Kementerian Perdagangan dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
9. Pelamar yang terbukti memberi keterangan yang tidak sesuai/tidak benar/memanipulasi/memalsukan data, akan dinyatakan gugur;
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia;
11. Setiap informasi/perubahan informasi terkait pelaksanaan pengadaan CPPPK Kementerian Perdagangan Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian Perdagangan <https://rekrutmen.kemendag.go.id> dan Portal Nasional <https://sscASN.bkn.go.id>;
12. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan CPPPK Kementerian Perdagangan Tahun 2023 dapat menghubungi:
 - a. *Whatsapp* 081586249080 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 - 16.00 WIB)
 - b. Twitter @casnkemendag
13. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi.

Jakarta, 19 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

selaku

Ketua Panitia Rekrutmen PPPK

Kementerian Perdagangan TA 2023



LAMPIRAN I

Nomor : KP.01/16/REK-CASN/PENG/09/2023
Tanggal : 19 September 2023

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Deskripsi Tugas Jabatan

No	Jabatan	Tugas Jabatan
1.	Ahli Muda - Pustakawan	Melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan
2.	Ahli Pertama - Dokter Gigi	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat
3.	Ahli Pertama - Analis Hukum	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum
4.	Ahli Pertama - Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan	Melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pemelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan
5.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
6.	Ahli Pertama - Analis Perdagangan	Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi

No	Jabatan	Tugas Jabatan
		perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen
7.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8.	Ahli Pertama - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
9.	Ahli Pertama - Negosiator Perdagangan	Melaksanakan negosiasi melalui kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional
10.	Ahli Pertama - Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK dan SRG dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang PBK, SRG, dan PLK.
11.	Ahli Pertama - Penera	Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera uang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera
12.	Ahli Pertama - Pengawas Kemetrolagian	Melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal.
13.	Ahli Pertama - Pengawas Perdagangan	Melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum
14.	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan

No	Jabatan	Tugas Jabatan
		pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola
15.	Ahli Pertama - Perencana	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada Instansi Pemerintahan secara terstruktur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
16.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan
17.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
18.	Ahli Pertama - Pranata Laboratorium Kemetrolagian	Melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal
19.	Ahli Pertama - Pustakawan	Melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan
20.	Ahli Pertama - Statistisi	Melakukan kegiatan statistik
21.	Ahli Pertama - Widyaiswara	Melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN
22.	Mahir - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
23.	Terampil - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
24.	Terampil - Penera	Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera uang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera
25.	Terampil - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana

No	Jabatan	Tugas Jabatan
		teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
26.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara
27.	Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

LAMPIRAN II

Nomor : KP.01/16/REK-CASN/PENG/09/2023
Tanggal : 19 September 2023

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

No	Jabatan	Penghasilan Minimal	Penghasilan Maksimal
1.	Ahli Muda - Pustakawan	Rp 8.300.000	Rp 8.800.000
2.	Ahli Pertama - Dokter Gigi	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
3.	Ahli Pertama - Analis Hukum	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
4.	Ahli Pertama - Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
5.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
6.	Ahli Pertama - Analis Perdagangan	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
7.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
8.	Ahli Pertama - Arsiparis	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
9.	Ahli Pertama - Negosiator Perdagangan	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
10.	Ahli Pertama - Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
11.	Ahli Pertama - Penera	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
12.	Ahli Pertama - Pengawas Kemetrolagian	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
13.	Ahli Pertama - Pengawas Perdagangan	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
14.	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
15.	Ahli Pertama - Perencana	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
16.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
17.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
18.	Ahli Pertama - Pranata Laboratorium Kemetrolagian	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
19.	Ahli Pertama - Pustakawan	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
20.	Ahli Pertama - Statistisi	Rp 7.500.000	Rp 8.100.000
21.	Ahli Pertama - Widyaiswara	Rp 7.600.000	Rp 8.200.000
22.	Mahir - Arsiparis	Rp 6.800.000	Rp 7.400.000
23.	Terampil - Arsiparis	Rp 6.000.000	Rp 6.600.000
24.	Terampil - Penera	Rp 6.000.000	Rp 6.600.000
25.	Terampil - Pranata Komputer	Rp 6.000.000	Rp 6.600.000
26.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp 6.000.000	Rp 6.600.000
27.	Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut	Rp 6.000.000	Rp 6.600.000

Lampiran III

Nomor : KP.01/16/REK-CASN/PENG/09/2023
Tanggal : 19 September 2023

FORMAT SURAT LAMARAN

Jakarta, 2023

Yth. Menteri Perdagangan
Di –
Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Jenis Kelamin :
Jenjang Pendidikan dan Program Studi :
Jabatan yang dilamar :
Alamat :
Nomor Telepon/WA :
Alamat Email :

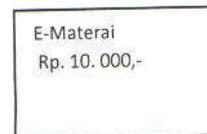
Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di Lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023. Demikian surat lamaran ini dibuat.

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2023.

Atas perhatian Bapak Menteri Perdagangan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ttd



(Nama Lengkap)

Lampiran IV

Nomor : KP.01/16/REK-CASN/PENG/09/2023

Tanggal : 19 September 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Bada Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

Ttd

E-Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)

Lampiran V

Nomor : KP.01/16/REK-CASN/PENG/09/2023

Tanggal : 19 September 2023

(KOP UNIT ESELON II KEMENTERIAN PERDAGANGAN)

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
(Nomor Surat)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP : (NIP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II)
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Handphone :
Deskripsi Pekerjaan : (deskripsikan pekerjaan secara singkat)

Adalah benar merupakan Pegawai Non ASN yang bekerja pada (nama unit kerja) selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023

Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat



(ttd)

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Keterangan:

Format Surat Keterangan bagi pelamar Khusus/Tenaga Non ASN Kementerian Perdagangan

Lampiran VI

Nomor : KP.01/16/REK-CASN/PENG/09/2023

Tanggal : 19 September 2023

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
(Nomor Surat)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK : (NIP bagi Instansi Pemerintah dan NIK bagi Non Instansi Pemerintah)
Jabatan :
Unit Kerja/Perusahaan : (Unit Kerja bagi Instansi Pemerintah dan Perusahaan bagi Non Instansi Pemerintah)
Alamat Unit Kerja/Perusahaan:

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor Handphone :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023

Direktur/Kepala/Kepala Divisi



(ttd)

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Keterangan:
Format Surat Keterangan bagi pelamar Umum

Lampiran VII

Nomor : KP.01/16/REK-CASN/PENG/09/2023
Tanggal : 19 September 2023

(KOP PERUSAHAAN)

(Nomor Surat)
PORTOFOLIO PENGALAMAN KERJA

1. Identitas Diri:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Email :
Nomor Telp/Handphone :

2. Profil pekerjaan saat ini/terakhir bekerja:

Jabatan :
Unit Kerja/Perusahaan :
Deskripsi Pekerjaan :

(Deskripsi pekerjaan harus menggambarkan secara singkat dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan)

.....
.....

3. Riwayat Pekerjaan

No	Tempat Bekerja	Jabatan	Masa Kerja		Surat Keputusan			No. Telp PIC HRD
			Tgl Mulai	Tgl Selesai	Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan	
1.	PT. ABC	Petugas Personalia	12 Januari 2019	Saat ini				
2.	PT. DEF	Petugas Personalia	2 Januari 2018	3 Desember 2019				
	dst....							

Catatan:

Setiap rincian riwayat pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan, wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan tempat bekerja. **(Riwayat Pekerjaan diurutkan berdasarkan riwayat pekerjaan saat ini (terkini) sampai riwayat pekerjaan sebelumnya).**

Mengetahui,
Direktur/Kepala/Kepala Divisi

..... 2023
Yang Membuat Pernyataan,



(ttd)
(Nama Lengkap)
NIP/NIK

(ttd)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

Format Surat Keterangan bagi pelamar Umum yang bekerja secara tidak berturut-turut/akumulatif